

SISTEM PERKREDITAN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN KEUANGAN MIKRO Mendukung Model Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Di Provinsi Riau

Oni Ekalinda ¹⁾

¹⁾ Penyuluh Pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau

ABSTRAK

Kehadiran kelembagaan keuangan mikro di pedesaan sangat membantu petani dalam mengatasi kelangkaan permodalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai : (i) Sistem perkreditan pada lembaga pembiayaan keuangan, (ii) partisipasi rumah tangga tani dalam pemanfaatan lembaga pembiayaan keuangan dan (iii) keragaan pembiayaan usahatani bantuan pemerintah (PUAP). Penelitian telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013. Lokasi pengambilan sampel ditentukan secara purposif Random Sampling, yaitu daerah yang telah melakukan akses terhadap lembaga pembiayaan keuangan baik formal maupun non formal. Jumlah responden pada setiap Kabupaten sebanyak 60 orang rumah tangga tani dan 6 orang yang melakukan perkreditan non formal. Hasil penelitian menunjukkan : (i) lembaga keuangan yang banyak diakses oleh petani adalah lembaga keuangan non formal dimana sistem pengembalian kredit maupun jangka waktu pengembaliannya disesuaikan dengan jenis komoditas pertanian dominan yang diusahakan, jenis pinjaman yang diberikan yaitu uang atau sarana produksi; (ii) partisipasi rumah tangga petani dalam memanfaatkan lembaga keuangan terutama non formal cukup tinggi (sekitar 30%). Pada umumnya kredit yang dipinjam petani digunakan untuk kegiatan produktif. Kredit yang dipinjam pada umumnya dalam bentuk sarana produksi yang dikembalikan setelah panen dalam bentuk hasil produksi, (iii) tingkat pengembalian pinjaman yang berasal dari dana PUAP tergolong lancar yaitu sekitar 98 % dari total pinjaman pada setiap periode peminjaman.

Kata kunci : Sistem perkreditan, lembaga pembiayaan keuangan mikro, Model Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

ABSTRACT

Many financial institutions have been established to help farmers to overcome the lack of funding. This study aimed to obtain information regarding: (i) The financing system on the financing institutions, (ii) the rural household participation that able to access financial institutions and (iii) the performance of Rural Agribusiness Development Program (PUAP). The study was conducted in Kampar Regency and Indragiri Hilir Regency in 2013. The study site was chosen by the purposive sampling. These two study site had made access to the financial institutions both formal and non-formal. The number of respondents in each regency were 60 farm households and 6 respondents who perform non-formal credit. The research result shows: (i) the financial institutions that are accessible to farmers is non-formal financial institution where the system of loan repayment and repayment periods adjusted to the type of dominant cultivated agricultural commodities, the types of loans are money or the production input; (ii) the participation of farm households when accessing financial institutions, especially non-formal is high at almost 30% from respondents. In general, farmers need loans for production activities. The loans are borrowed in the form of production input that is returned after harvest. (3) Around 98% of the repayment are classified as performing loans.

Keywords: financing system, microfinance institutions, Rural Agribusiness Development Program (PUAP).

PENDAHULUAN

Pengembangan ekonomi kerakyatan dan pengembangan dunia usaha menjadi *issue* kunci dalam program pembangunan di Riau. Termasuk dalam program pemberdayaan ekonomi kerakyatan antara lain adalah pengentasan kemiskinan, mendorong sektor prioritas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan. Pemberdayaan usaha kecil seperti usahatani, dipandang akan mampu menggerakkan ekonomi pedesaan dan pada gilirannya akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional (Ihwan, 2007).

Menurut Ashari (2006), kegiatan perekonomian pada umumnya masih banyak didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utamanya petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian dengan permasalahan utama adalah kelangkaan modal yang merupakan siklus mata rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan.

Terkait dengan program pemberdayaan ekonomi disektor pertanian, permasalahan utama yang mendasar adalah adanya tenggang waktu yang relatif lama antara saat tanam hingga saat panen dengan risiko usaha yang cukup besar, seperti kegagalan panen akibat faktor internal dan eksternal dalam pengelolaan usahatani (Dirjen Pembiayaan, 2004). Kondisi ini menjadi kendala bagi petani untuk dapat memanfaatkan dana yang tersedia pada lembaga keuangan formal, (Khusnul, 2011). Menurut Wirjono (2005), pemberian akses yang luas terhadap terhadap sumber-sumber pembiayaan kecil dan mikro dari lembaga keuangan mikro sangat membantu

masyarakat miskin yang memiliki kemauan dan kemampuan produktif untuk mengembangkan usahanya. Kanjeng (2013), menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro yang merupakan salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan dipedesaan sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk produksi, konsumsi dan menyimpan hasil usaha. Menurut Sumarno (2009), bantuan modal dengan perbaikan kelembagaan petani merupakan salah satu bagian untuk melakukan pemberdayaan ekonomi petani terutama dalam penyediaan modal usahatani dan menumbuhkan kembangkan unit-unit usaha produktif dipedesaan.

Kelembagaan ekonomi yang diunggulkan pada masa yang akan datang adalah lembaga ekonomi yang dapat mentransformasikan ekonomi tradisi menjadi pembentuk struktur ekonomi pasar, yang dicirikan sebagai berikut : (1) petani (produsen) haruslah menjadi pemilik saham terhadap keseluruhan jaringan kegiatan ekonomi desa sehingga secara kolektif petani adalah penguasa jaringan agribisnis; (2) keorganisasian petani meliputi keseluruhan jaringan agribisnis ; (3) Output suatu usahatani tidak hanya bahan mentah tetapi juga komoditas olahan yang telah meperoleh perlakuan iptek serta (4) adanya hubungan kemitraan antar pelaku agribisnis dengan menerapkan azas keterbukaan dan demokrasi (Badan Pengkajian dan Kebijakan Perdagangan, 2013)

Tripanaji (2003), menyatakan bahwa peran lembaga pembiayaan mikro sangat besar artinya terutama dalam mengatasi kesulitan permodalan petani. Model Pengembangan

Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang diluncurkan pemerintah, diharapkan dapat menjadi salah satu pionir dalam menumbuhkan kelembagaan keuangan mikro dipedesaan yang sangat dibutuhkan petani dalam meperlancar usaha produktif dipedesaan. Menurut Syukri *et al/* (2008), untuk menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan mikro dipedesaan sangat diperlukan kesiapan baik dana maupun manajemen dalam pengelolaan dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat tani, sehingga dapat menjangkau lebih banyak petani dan kedepan diharapkan akan tumbuh usahatani yang berorientasi bisnis dimana petani terlibat secara keseluruhan dalam kegiatan agribisnis yang dilakukannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Pengkajian

Pengkajian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013.

Metode Pengambilan Sampel

Lokasi pengambilan sample ditentukan secara purposif Random Sampling yaitu daerah yang telah melakukan akses terhadap lembaga pembiayaan keuangan baik formal maupun non formal. Jumlah responden pada setiap kabupaten sebanyak 60 orang rumah tangga tani dan 6 orang yang melakukan perkreditan non formal. Pemilihan sampel responden ditentukan berdasarkan perannya dalam aktifitas pemberian kredit kepada masyarakat desa. Data yang telah terkumpul selanjutnya ditabulasi dan dianalisis secara diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Perkreditan Pada Lembaga Pembiayaan Keuangan Koperasi Unit Desa (KUD)

Sistem kredit yang diterapkan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) terlihat pada tabel 1, untuk Kabupaten Kampar berkisar antara 6 – 10 bulan, dan Kabupaten Indragiri Hilir 4 bulan. Dalam penetapan waktu pengembalian tergantung kesepakatan anggota. Jenis pinjaman yang diberikan KUD adalah sarana produksi (pupuk) dan pelayanan jasa traktor. Bentuk pengembalian pinjaman dalam bentuk natura (gabah) yang dibayar setelah panen, kecuali untuk jasa traktor di kabupaten Kampar dibayarkan dalam bentuk uang yang dikembalikan setelah panen. Suku bunga yang dikenakan untuk peminjam bervariasi antara 1 – 2 % per bulan. Untuk pinjaman sarana produksi KUD tidak dapat menyediakan sepanjang waktu sesuai dengan kebutuhan petani, hal ini dikarenakan terbatasnya modal KUD, dan tidak semua petani (anggota) yang akses dengan KUD. Hampir semua KUD di Kecamatan yang diamati tidak aktif melaksanakan fungsinya, bahkan KUD tersebut cenderung bubar (tidak ada lagi), hal ini disebabkan karena manajemen KUD yang buruk dan tidak ada keterbukaan antara pengurus KUD dengan anggotanya baik dari segi administrasi maupun keuangan.

Aksesibilitas petani dalam memanfaatkan jasa KUD di Kabupaten Kampar lebih baik dibandingkan Kabupaten Indragiri Hilir. Petani biasanya memanfaatkan jasa KUD untuk kegiatan usahatani padi, terutama dalam penyediaan pupuk dan jasa traktor untuk pengolahan tanah. Bentuk pengembalian

pinjaman bisa dalam bentuk natura (gabah) atau dalam bentuk uang yang disesuaikan dengan nilai jenis pinjaman.

Tabel 1: Sistem Perkreditan Melalui Koperasi Unit Desa (KUD) di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013

Uraian	Kampar		Ind.Hilir	
	Air Tiris	Kampar Kiri Hilir	Tem puling	Enok
Jangka waktu pengembalian kredit (bulan)	6	10	4	4
Jenis dan jumlah pinjaman/ orang :				
a. Pupuk (ku)	2,5	2,5	0	0
b. Bibit (Rp000)	0	0	0	0
c. Obat-obatan (Rp000)	0	0	0	0
d. Jasa traktor (ha)	2	2	0	0
Nilai pinjaman (Rp 000) :				
a. Pupuk (Rp000)	250	250	0	0
b. Bibit (Rp000)	0	0	0	0
c. Obat-obatan (Rp000)	0	0	0	0
d. Jasa traktor (ha)	400	400	0	0
Bentuk pengembalian berdasarkan jenis pinjaman :				
a. Pupuk	Gabah	gabah	-	-
b. Bibit (Rp000)	-	-	-	-
c. Obat-obatan (Rp000)	-	-	-	-
d. Jasa traktor (ha)	uang	uang	-	-
Nilai pengembalian (Rp000)				
a. Pupuk (Rp000)	300	275	0	0
b. Bibit (Rp000)	0	0	0	0
c. Obat-obatan (Rp000)	0	0	0	0
d. Jasa traktor (ha)	450	450	0	0

Perbankan

Dalam mekanisme peminjaman uang, perbankan jauh lebih baik dibanding lembaga keuangan lain. Hal ini disebabkan karena adanya aturan dan sanksi yang jelas terhadap peminjam. Kelayakan peminjam ditelusuri dari persyaratan baik secara administrasi maupun kemampuan dalam membayar pinjaman. Kendati dari segi ketersediaan dana pinjaman,

bank tidak mengalami kesulitan dalam penyediaannya, namun tidak semua orang dapat memanfaatkan jasa bank, terutama petani. Hal ini disebabkan karena sulitnya persyaratan yang ditetapkan bank untuk dipenuhi oleh petani, disamping itu adanya tenggang waktu yang cukup lama antara permohonan pinjaman dengan pencairan kredit. Sedangkan untuk kebutuhan usahatani, petani memerlukan uang tunai dalam waktu yang cepat. Jauhnya jarak lokasi petani dengan keberadaan bank, juga menyulitkan petani untuk melakukan akses ke bank. Dari tabel 2, terlihat bahwa petani yang melakukan transaksi pinjaman dengan bank, hanya terkait dengan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah, sedangkan pinjaman murni dengan pihak bank tidak ada dilakukan oleh petani.

Tabel 2. Sistem Perkreditan Melalui Perbankan (BRI) di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013.

Uraian	Kampar		Ind.Hilir	
	Air Tiris	Kampar Kiri Hilir	Tem puling	Enok
Persyaratan pinjaman:				
Jaminan surat tanah	V	V	V	V
Jaminan lainnya	-	-	-	-
Rata-rata nilai pinjaman/ org :				
Usahatani	2.000	2.000	2.000	2.000
Usaha dagang	2.000	2.000	0	0
Industri Rumah tangga	3.000	4.000	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Jangka waktu pengembalian kredit (bulan)				
Usahatani	6	6	6	6
Usaha dagang	12	12	0	0
Industri rumah tangga	12	12	0	0
Tingkat bunga per tahun (%)	3	3	3	3

Lembaga Keuangan Non Formal

Dalam pemberian kredit pada sistem yang digunakan oleh lembaga keuangan non

formal agak bervariasi pada setiap desa. Variasi yang terjadi baik dalam bentuk pengembalian kredit maupun jangka waktu pengembaliannya yang biasanya disesuaikan dengan jenis komoditas pertanian dominan yang diusahakan masing-masing desa. Demikian pula pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk yang berbeda pula menurut jenis pinjaman yang diberikan yaitu uang atau sarana produksi. Pinjaman dalam bentuk pupuk atau uang, pengembalian kredit pada umumnya dilakukan dalam bentuk hasil produksi, kecuali di Kabupaten Kampar pengembalian dibayarkan dalam bentuk uang. Pengembalian kredit dalam bentuk uang dilakukan oleh pedagang sarana produksi, sedangkan kredit yang dibayarkan dalam bentuk gabah (hasil produksi) dilakukan oleh penggilingan padi.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengembalian kredit dalam bentuk hasil produksi lebih disukai. Pola demikian terjadi untuk berbagai jenis pinjaman namun cenderung lebih berlaku untuk pinjaman yang bernilai lebih tinggi dan sangat dibutuhkan oleh petani seperti pupuk dan jasa traktor atau pinjaman uang yang bernilai lebih dari Rp 100.000. Adanya kecenderungan tersebut cukup beralasan mengingat aktifitas perkreditan non formal umumnya dilakukan oleh perseorangan yang juga terlibat dalam perdagangan hasil produksi seperti pemilik penggilingan padi atau pedagang hasil bumi. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Dahlan (2009) bahwa lembaga keuangan non formal memiliki keunggulan yang relatif tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya yaitu mudah diakses oleh petani, memiliki fleksibilitas/keluwesannya dalam melakukan transaksi dan lebih memahami keadaan sosial

budaya masyarakat. Dengan demikian, melalui pengembalian dalam bentuk hasil produksi, pemberi kredit non formal tidak hanya memperoleh keuntungan dari jasa pemberian kredit tetapi juga dari hasil penjualan sarana produksi maupun hasil produksi. Sedangkan bagi pemilik penggilingan padi juga memperoleh keuntungan lain dalam bentuk pemenuhan kapasitas penggilingan yang dimiliki.

Sebenarnya, pemberi kredit tidak mengharuskan peminjam membayar dalam bentuk hasil produksi. Petani dapat saja mengembalikan dalam bentuk uang, akan tetapi bunga yang dikenakan relatif tinggi yaitu 15-20 %, hal ini dikarenakan pengembalian dalam bentuk uang menyebabkan keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil produksi tidak diperoleh pemberi pinjaman. Petani lebih menyukai pengembalian dalam bentuk hasil produksi karena selain praktis juga nilai bunga yang dibayar lebih ringan.

Tabel 3. Sistem perkreditan sarana produksi pada Lembaga Keuangan Non Formal di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir , 2013.

Uraian	Kampar		Ind.Hilir	
	Air Tiris	Kampar Kiri Hilir	Tempuling	Enok
Jangka waktu pengembalian kredit (bulan)	4	6	4	4
Jenis dan jumlah pinjaman:				
a. Pupuk (ku)	75	60	35	25
b. Bibit (Rp 000)	0	0	0	0
c. Obat-obatan (Rp000)	0	0	0	0
d. Jasa traktor (ha)	9	15	5	3
Nilai pinjaman (Rp 000)				
a. Pupuk (Rp 000)	250	250	100	100
b. Bibit (Rp 000)	0	0	0	0
c. Obat-obatan (Rp000)	0	0	0	0
d. Jasa traktor (ha)	2	2	2	2
Bentuk pengembalian berdasarkan jenis pinjaman :				
a. Pupuk	uang	uang	gabah	gabah
b. Bibit	-	-	-	-
c. Obat-obatan	-	-	-	-
d. Jasa traktor	uang	uang	gabah	gabah
Nilai pengembalian (Rp 000)				
a. Pupuk	300	300	125	125
b. Bibit (Rp000)	0	0	0	0
c. Obat-obatan (Rp000)	0	0	0	0
d. Jasa traktor (ha)	250	250	0	0

Tabel 4. Sistem perkreditan non sarana produksi pada Lembaga Keuangan Non Formal di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013.

Uraian	Kampar		Ind. Hilir	
	Air Tiris	Kampar Kiri Hilir	Tempuling	Enok
Cara pengembalian kredit:				
a. Ijon	-	-	-	-
b. Bayar saat panen	-	-	-	V
Jangka waktu pengembalian kredit (bulan) :				
a. 3 – 4 bulan	-	-	-	V
b. 1 – 2 bulan	-	-	-	-
Bentuk pengembalian	-	-	-	gabah
Nilai pinjaman (Rp 000)	-	-	-	225
Jumlah pengembalian dalam bentuk hsl produksi (ku)				
a. 3 – 4 bulan	-	-	-	2,25
b. 1 – 2 bulan	-	-	-	-
Bunga per bulan (%)				
a. 3 – 4 bulan	-	-	-	8
b. 1 – 2 bulan	-	-	-	-

Partisipasi Rumah Tangga Tani Dalam Pemanfaatan Lembaga Pembiayaan

Keberadaan lembaga keuangan untuk pembiayaan usahatani dan kebutuhan rumah tangga lainnya sangat dibutuhkan oleh petani dipedesaan. Indikasi tersebut terlihat pada tabel 5, dimana hampir 30 % responden di Kecamatan yang diamati memiliki pinjaman. Pada umumnya kredit yang dipinjam petani digunakan untuk kegiatan produktif (usahatani). Sumber peminjaman kredit adalah lembaga keuangan non formal. Kredit yang dipinjam pada umumnya dalam bentuk sarana produksi yang dikembalikan setelah panen dalam bentuk natura (hasil produksi). Peminjam kredit yang paling tinggi terlihat di Kabupaten Kampar.

Tabel 5. Tingkat Partisipasi Rumah Tangga Tani Dalam Pemanfaatan Lembaga Perkreditan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013

Uraian	Kampar		Ind.Hilir	
	Air Tiris	Kampar Kiri Hilir	Tempuling	Enok
Jumlah responden	30	30	30	30
Jumlah responden peminjam kredit	11 (36 %)	13 (43%)	2 (6%)	5 (17)
Jenis kredit yg dipinjam (responden)				
a. sarana produksi	11 (36%)	13 (43%)	2 (6%)	4 (16%)
b. uang	0	0	0	1
Sumber kredit yang digunakan (responden)				
a. KUD / BRI	-	-	-	-
b. Lembaga NonFormal	V	V	V	V
Sumber kredit saprodi (resp)				
a. KUD / BRI	-	-	-	-
b. Lembaga Non formal	11 (36%)	13 (43%)	2 (6%)	5 (17)
Sumber kredit dalam bentuk uang (responden)				
a. KUD / BRI	-	-	-	-
b. Lembaga Non Formal	-	-	1	-

Keragaan Pembiayaan Usahatani Bantuan Pemerintah (PUAP)

Pendekatan pembinaan dengan pola kelembagaan petani ternyata lebih efektif. Hal ini terlihat dari tingkat pengembalian pinjaman, dimana sekitar 98 % tingkat pengembalian adalah lancar dengan posisi modal kelompok tani yang diperoleh dari bunga pinjaman masih memiliki deposit (kelebihan) untuk cadangan modal kelompok atau dapat juga digunakan untuk kegiatan produktif lainnya. Hal ini menunjukkan sebenarnya dari segi kemampuan, petani dapat melakukan pembayaran pinjaman, hanya saja untuk memperbaiki perilaku petani dalam hal mengembalikan pinjaman, memang diperlukan sanksi dan aturan-aturan yang jelas serta pengawasan yang ketat dari institusi terkait.

Tabel 6. Keragaan Pembiayaan Usahatani Bantuan Pemerintah (PUAP) di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013

Uraian	Ind. Hilir		Kampar	
	Tempuling	Enok	Air Tiris	Kampar Kiri Hilir
Jenis Usaha yang didanai :				
a. Usahatani	V	V	V	V
b. Industri	V	V	-	V
c. Rumah Tangga Usaha Dagang	-	V	-	-
Jumlah Kelompok Tani yang terlibat (kelompok)	467	97	81	63
Rataan Jumlah modal per kelompok saat ini (Rp000)	1.185	1.100	1.000	500
Tingkat bunga per thn (%)	5	3	5	7
Kelancaran Pengembalian pinjaman (%)				
a. lancar	100	98	96	95
b. kurang lancar	0	2	4	5
c. macet	0	0	0	0
Pengawasan :				
a. intensif	V	-	-	-
b. Kurang intensif	-	V	V	V
c. Tidak intensif	-	-	-	-
Perkembangan jumlah peserta				
a. tetap	-	V	-	V
b.makin banyak	V	-	-	-
c. makin sedikit	-	-	-	-

KESIMPULAN

1. Lembaga keuangan yang banyak diakses oleh petani adalah lembaga keuangan non formal, sedangkan lembaga keuangan formal hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil petani.
2. Dari tingkat partisipasi petani dalam pemanfaatan lembaga perkreditan terlihat bahwa lebih dari 30 % petani dapat mengakses melalui peminjaman kredit. Sumber peminjaman kredit adalah lembaga keuangan non formal. Kredit yang dipinjam pada umumnya dalam bentuk sarana

produksi yang dikembalikan setelah panen dalam bentuk natura (hasil produksi).

3. Pendekatan pembinaan dengan pola kelembagaan petani (PUAP) lebih efektif, terbukti sekitar 98 % tingkat pengembalian adalah lancar dengan posisi modal kelompok tani yang diperoleh dari bunga pinjaman masih memiliki deposit (kelebihan) untuk cadangan modal kelompok atau dapat juga digunakan untuk kegiatan produktif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pembangunan, 2006, Analisis Kebijakan Pertanian, volume 4 no 2, juni 2006, 146-164, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor
- Badan Pengkajian dan Kebijakan Perdagangan, 2013, Analisis Peran Lembaga Pembiayaan dalam UMKM, Kementrian Perdagangan, Jakarta.
- Dahlan Tampubolon, Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan di Kabupaten Bengkalis, Tesis Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, 2009 Direktorat Pembiayaan 2004, Kelembagaan dan Pola Pelayanan Keuangan Mikro untuk Sektor Pertanian, Jakarta, Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian, Departemen Pertanian.
- I Gde Kanjeng Baskara, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buletin Studi Ekonomi, vol 18 no 2, 2013
- Ihwan Susila, Analisis Efisiensi Lembaga Keuangan Mikro, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vio 8 no 2, hal 223 – 242, Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta, 2007
- Khusnul Ashar, Analisis Terhadap Kesenambungan Lembaga Pembiayaan Pedesaan Dalam Mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Journal Of Indonesian Applied Economics, vol 5 no 1, 2011
- Sumarno, 2009, Pengembangan Usahatani berdasarkan sosial ekonomi dan agroklimat, Balai Penelitian Tanaman Pangan, Maros
- Syukri Lukman, Niki Lukviarman, Harif Amali Rivai, Tafdil Husni, Syafrizal, Maruf, 2008, Kajian Upaya Penguatan Peran Mikrobanking dan Pendekatan Pembiayaan Kelompok dalam Rangka Pengembangan UMK di Sumatera Barat, Center for banking research 2008.
- Tripranaji, 2003, Penajaman Analisis Kelembagaan Dalam Perspektif Penelitian Sosiologi Pertanian Dan Pedesaan, Forum Penelitian Agro Ekonomi, Pusat penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, 2003
- Wiloejo wirjo wijono, Pemberdayaan lembaga keuangan mikro sebagai salah satu pilar system keuangan nasional : Upaya konkrit memutus mata rantai kemiskinan, Jurnal kajian ekonomi dan keuangan, Edisi khusus, Jakarta, 2005